

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis data dari bab III, serta temuan penelitian dari bab IV di atas, maka kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Kelompok Islam lokal yang tergabung dalam beberapa elemen *civil society* seperti NU, MUI, BASSRA dan FMU Sampang-Pamekasan, menggunakan strategi gerakan protes dengan kekerasan. Pilihan strategi ini didasarkan pertimbangan rasional; bahwa gerakan protes dengan kekerasan lebih efektif dan berhasil dalam mencapai tujuan gerakan; yaitu menentang keberadaan kelompok ideologi Syi'ah dari Desa Karang Gayam Sampang. Gerakan protes ini terjadi dua kali, yaitu; tanggal 29 Desember 2011, serta tanggal 26 Agustus 2012, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa sebanyak dua orang serta pembakaran seluruh aset milik kelompok Syi'ah. Di samping itu, gerakan protes ini menyebabkan terusirnya kelompok Syi'ah dan mengungsi ke GOR Sampang, selama 8 bulan, dan kemudian dipindah ke Rusunawa Puspa Agro Jemundo Sidoarjo.

Mobilisasi struktur dalam gerakan protes ini terjadi secara sistematis, mulai dari pengajian-pengajian umum, penggunaan struktur mushalla sebagai sarana mobilisasi massa, ritual selamat atau *kolomman* dengan intensitas yang tinggi, sampai penggunaan alat komunikasi canggih seperti *handphone*.

Sarana-sarana mobilisasi struktur tidak hanya terbatas pada struktur sosial dalam skala mikro seperti mushalla dan pengajian umum maupun ritual selamatan atau *kolomman* dengan intensitas yang tinggi, namun juga melibatkan kelompok organisasi-organisasi masyarakat sipil baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Organisasi-organisasi masyarakat sipil ini turut andil dalam memobilisasi massa sehingga lebih memudahkan agen-agen aksi protes untuk mencapai tujuannya. Dalam kasus gerakan protes Islam lokal Desa Karang Gayam Sampang ini, beberapa Organisasi-organisasi masyarakat sipil yang terlibat adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sampang, Nahdlatul Ulama (NU) cabang Sampang, Badan Silaturahmi Ulama Se-Madura (BASSRA), serta Forum Musyawarah Ulama Sampang-Pamekasan (FMU).

2. Faktor-faktor terjadinya Gerakan Protes Islam Lokal Madura adalah:

a. Faktor Budaya dan Etnisitas

Gerakan protes Islam lokal menentang kelompok aliran Syi'ah yang terjadi di Desa Karang Gayam juga erat kaitannya dengan persoalan budaya orang Madura. Terutama budaya yang berkaitan dengan kehormatan dan agama / aliran agama yang harus diikuti oleh orang Madura, sebagaimana pembahasan di atas. Agama bagi orang Madura adalah Islam, khususnya Islam aliran Sunni. Agama dengan aliran ini sudah meresap dan mewarnai pola kehidupan sosial mereka.

b. Faktor Keluhan Sosial (*Grievance*)

Gerakan protes dengan kekerasan yang kemudian berwujud penyerangan dan pembakaran atas tempat peribadatan beserta madrasah Syi'ah di

Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran, Kecamatan Karang Penang pada 29 Desember 2011 dan pada tanggal 26 Agustus 2012 lalu dipicu oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut sebenarnya merupakan keluhan (*grievance*) massa Islam lokal terhadap keberadaan kelompok Syi'ah yang dianggap sesat. Bukan hanya faktor konflik keluarga sebagaimana selama ini dipahami banyak orang, tapi juga sangat erat terkait dengan konflik paham keagamaan dan harga diri orang Madura. Selain keluhan tentang kesesatan ajaran Syi'ah, keluhan komunitas Islam di Desa Karang Gayam lainnya adalah terkait dengan metode dakwah yang digunakan komunitas Syi'ah yang dianggap terlalu keras dan tidak cocok diterapkan di Madura. Komunitas Islam lokal Sunni di Desa Karang Gayam merasa resah karena tradisi hormat dan ta'dzim kepada guru khususnya kyai, dianggap bid'ah dan seharusnya ditinggalkan oleh masyarakat.

Keluhan lain dari kelompok Islam lokal Desa Karang Gayam khususnya, dan orang Madura umumnya terkait keberadaan kelompok Syi'ah, adalah karena kelompok Syi'ah berusaha menghapus tradisi Maulid Nabi yang sudah lama dianggap wajib oleh warga.

c. Faktor Pembingkai (*Framing*) Gerakan Protes

Gerakan Islam lokal Madura, membingkai otoritas dirinya sebagai kelompok Sunni yang memegang teguh prinsip Islam yang benar, dan menyerang lawannya sebagai kelompok aliran sesat yang berupa Syi'ah.

d. Faktor Struktur Kesempatan Politik (*Political Opportunity Structure*).

Dalam kasus di Sampang ini, struktur kesempatan politik bisa berwujud dukungan pemerintah dalam berbagai kebijakan yang diambil, di mana lebih cenderung memprioritaskan aspirasi kelompok pemrotes. Hal ini mengirimkan pesan kepada massa anti Syi'ah, bahwa gerakan protes tersebut mendapatkan momentum yang baik secara politik, karena massa Islam lokal merasa, bahwa pemerintah dalam hal ini aparat keamanan, membiarkan terjadinya struktur politik yang mendorong terjadinya aksi protes dengan kekerasan terhadap kelompok Syi'ah. Sebagaimana dalam paparan data di atas, khusus dalam kasus gerakan protes di Sampang ini, yang terjadi adalah “struktur dukungan politik,” bukan hanya “struktur kesempatan politik.”

### 3. Dampak Gerakan Protes

Bagi kedua kelompok yang berseteru, dampak yang ditimbulkan dari terjadinya gerakan protes ini, tentu saja akan berbeda. Bagi kelompok Sunni yang melakukan protes; dampaknya tidak separah dengan apa yang terjadi pada kelompok Syi'ah. Walaupun demikian, ikatan-ikatan kekeluargaan, kesamaan etnis dan budaya, maupun modal sosial lainnya telah lenyap akibat terjadinya perseteruan ini. Akan tetapi, kelompok pemrotes merasa bahwa hasil yang diperoleh jauh lebih besar dari pada harga yang harus dibayar. Apalagi praktek-praktek polisional dalam arti respon pihak keamanan terhadap gerakan protes sangat toleran, bahkan terkesan memberikan dukungan yang turut menciptakan gerakan protes yang tertata dan berskala besar.

Sementara dampak yang dialami oleh kelompok Syi'ah akibat gerakan protes ini, bersifat kompleks dan multi dimensional; baik ekonomi, sosial, politik, keagamaan, psikologis, pendidikan, maupun dampak secara hukum terkait dengan status kewarganegaraannya di depan hukum negara demokrasi yang menganut prinsip kesamaan di depan hukum (*equality before the law*).

#### B. Implikasi Teoritik.

Sebelum membahas implikasi temuan penelitian di atas secara teoritik, ada baiknya mengupas sekilas posisi teori gerakan sosial dalam kaitannya dengan beberapa teori yang mempunyai persamaan maupun perbedaan postulatnya. Teori gerakan sosial ini muncul sebagai bentuk pendekatan jalan tengah dalam menganalisa episode dari tindakan-tindakan kolektif perlawanan (*contentious collective actions*).

Secara umum, ada tiga pendekatan teori dalam menganalisis tindakan kolektif, yang menekankan satuan analisis yang berbeda. Pertama; Teori struktural yang cenderung memiliki satuan analisis yang besar, yang secara umum terfokus pada sistem negara atau internasional untuk menjelaskan episode-episode besar dari tindakan kolektif. Dalam model struktural, memahami gejala besar, seperti revolusi sosial, hanya dapat dihasilkan dengan menganalisis perubahan satuan-satuan besar. Kedua, teori pilihan rasional (atau pilihan publik). Teori ini berada di ujung lain dalam spektrum satuan analisis.

Secara umum, teori pilihan rasional menolak satuan analisis yang secara efektif menjelaskan dirinya sendiri selain individu-individu. Bagi ahli teori pilihan rasional, analisis struktural sering dipandang tautologis, sebagai kerangka yang

tidak menjelaskan apa-apa dalam upaya untuk menjelaskan apa saja. Bagi teoritis ini, negara, kelompok, dan sistem tidak membuat pilihan, hanya individu yang memilih dan memodelkan pilihan individual dalam hubungan strategis dengan pilihan individual lain adalah pendekatan analitis yang lebih disukai untuk memahami tindakan kolektif, termasuk revolusi. Ketiga, adalah teori gerakan sosial, yang secara umum terfokus pada kelompok sebagai satuan analisis yang tepat dalam menjelaskan tindakan kolektif, seraya mengakui bahwa individu membuat pilihan strategis. Para ahli teori ini menekankan bahwa pilihan itu tidak dibuat di ruang hampa yang terpisah dari konteks, hubungan dan jaringan yang senantiasa berubah dalam hidup seseorang. Mengingat keputusan yang dibuat individu tidak dapat dipahami di luar konteks sosial kelompok, maka kelompok merupakan satuan analisis yang tepat. Pada saat yang sama, teori ini juga mengakui pentingnya perubahan struktural dalam menyediakan kondisi yang dibutuhkan untuk terciptanya suatu tindakan kolektif.

Implikasi teoritik dari temuan-temuan penelitian di atas adalah; gerakan protes Islam lokal yang terjadi di dusun Nangkernang Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben Kabupaten Sampang ini, semakin mempertegas teori ini sebagai pisau analisis yang tepat, dan menggunakan satuan analisis kelompok dengan tetap memperhatikan pilihan strategis yang dibuat oleh individu yang terlibat dalam aksi gerakan, dengan dua catatan tambahan: pertama, gerakan protes yang terjadi di Kabupaten Sampang ini memberikan porsi yang cukup besar terhadap budaya lokal dalam hal ini budaya Madura sebagaimana yang sudah dibahas di bab IV di atas, untuk memainkan peran sebagai faktor penyebab

terjadinya tindakan kolektif yang berupa gerakan protes. faktor budaya ini kemudian menjelma menjadi identitas komunal para pemrotes yang dimainkan oleh aktor-aktor gerakan melalui proses pemingkanaan. Dalam konstruksi masyarakat yang masih homogen, kesamaan budaya yang *gesselschaft*, nilai-nilai, etnisitas, akan menjadi pertimbangan utama seseorang melakukan tindakan sosial maupun tindakan kolektif. Oleh karena itu, alur pikir penelitian ini menempatkan ‘budaya dan etnisitas’ sebagai faktor-faktor yang secara signifikan mendorong terciptanya gerakan protes Islam lokal menentang kelompok Syi’ah di Kabupaten Sampang ini.

Kedua, dalam teori gerakan sosial, faktor eksogen yang paling signifikan bagi terjadinya gerakan protes adalah struktur kesempatan politik. Gerakan protes yang terjadi di Kecamatan Omben ini, tidak saja memperoleh kesempatan politik yang baik, bahkan dukungan sumber daya politik yang besar mulai level lokal kabupaten, regional maupun nasional sebagaimana terungkap dalam paparan dan analisis data di atas. Jadi dalam hal ini, *political opportunity structure* (struktur kesempatan politik) akan lebih tepat menjadi *political support(inity) structure* atau struktur dukungan politik. Tentunya hal ini tidak bisa dibuat konsep transferabilitas dalam teori maupun kasus-kasus gerakan protes di tempat lain, Karena hal ini hanya ada dalam kasus gerakan protes di Madura khususnya dan di Indonesia umumnya, dimana pemerintah lebih memaknai “stabilitas politik” sebagai pemihakan kelompok dengan paham keagamaan *mainstream*.

### C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas maka rekomendasi yang bisa diberikan adalah:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Sampang dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur; a). Agar melakukan program-program perdamaian, termasuk dengan menggunakan pendekatan kultural yang melibatkan para kiai di Sampang dan Pamekasan untuk mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati hak warga negara atas kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. b). Mengupayakan agar Desa Karang Gayam Kecamatan Omben khususnya dan Kabupaten Sampang pada umumnya, dibuatkan akses secara ekonomi dan pendidikan yang lebih luas sehingga masyarakat setempat tidak mudah terpancing atau terprovokasi dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang lebih baik. c). Mengupayakan rekonsiliasi yang menghormati keyakinan kedua belah pihak yang berseteru serta menghormati nilai-nilai budaya Madura yang masih dipegang teguh oleh masyarakat setempat. d). Memastikan bahwa hak-hak sipil dan kemanusiaan (HAM) para pengungsi kelompok Syi'ah dijamin dan dihormati sesuai Undang-Undang yang berlaku.
2. Kepada para kiai yang tergabung dalam elemen *civil society* seperti, NU, BASSRA, MUI, dan FMU; a). Agar menciptakan suasana keagamaan yang bisa mengembangkan sikap toleran dan sejuk di tengah-tengah masyarakatnya. b). Agar mengakomodir sistem pendidikan umum dengan



kurikulum pengajaran yang sudah baku dari kementerian agama atau kementerian pendidikan dan kebudayaan di samping sistem pendidikan salaf yang selama ini terdapat di pesantrennya. c). Agar mendukung seluas-luasnya setiap program pembangunan pemerintah untuk kemaslahatan Kabupaten Sampang pada umumnya.

3. Kepada masyarakat Kecamatan Omben dan Kabupaten Sampang umumnya; a). Agar tidak mudah terhasut dan terprovokasi untuk melakukan aksi-aksi kekerasan dan main hakim sendiri. b). Agar mengembangkan sikap toleran dalam memahami ajaran agama Islam dan nilai-nilai budaya Madura, sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam kehidupan sehari-hari. c). Mendukung dan berpartisipasi aktif terhadap semua program pembangunan pemerintah, sehingga dapat menciptakan budaya kewargaan yang baik bagi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera.